

EKONOMI PERKEBUNAN NUSANTARA TAHUN 1830-1930: AFDELING MALANG SEBAGAI JANTUNG KOPI

Arsala Lilmuttaqiin^{1*}, Annora Pratama Putri¹, dan
Moh. Heris Setiawan¹

¹Universitas Negeri Malang

*arsala.lilmuttaqiin.2407318@students.um.ac.id

Abstract

This study discusses the dynamics of the plantation economy in the archipelago in the period 1830-1930 with the main focus of Afdeling Malang as one of the most important production centers during the Dutch colonial period. This study is motivated by the significant role of coffee plantations in the Dutch colonial economic structure and its impact on socio-economic changes in the surrounding community. The main objective of this study is to understand and analyze how Afdeling Malang developed rapidly into the heart of coffee production in East Java in particular and the archipelago in general. The method used in this study is a historical approach from literature studies as the main technique for collecting data sources. The data sources analyzed include books, research journals, colonial archives, Dutch East Indies government documents, and plantation reports. The findings show that the success of Afdeling Malang as the heart of coffee production cannot be separated from the influence of climate and geographical location that support productivity. As well as the support of colonial infrastructure and forced cultivation policies in the early 19th century. In addition, there was the involvement of Dutch private companies in land expansion and management of local labor. Afdeling Malang played a vital role in the colonial coffee economy and made it a representation of how colonial economic power shaped the landscape of agricultural land and the local indigenous people of East Java.

Keywords: *Colonial Economy, Malang Afdeling, Coffee*

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika ekonomi perkebunan di Nusantara pada rentang waktu 1830-1930 dengan fokus utama Afdeling Malang sebagai salah satu pusat produksi terpenting pada masa kolonial Belanda. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran secara signifikan perkebunan kopi dalam struktur ekonomi kolonial Belanda beserta dampaknya terhadap perubahan sosial-ekonomi pada masyarakat sekitar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana Afdeling Malang berkembang pesat menjadi jantung produksi kopi di Jawa Timur khususnya dan Nusantara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dari studi pustaka sebagai teknik utama pengumpulan sumber data. Sumber data yang dianalisis meliputi buku, jurnal penelitian, arsip kolonial, dokumen pemerintah Hindia Belanda, serta laporan perkebunan. Hasil temuan menunjukkan bahwa keberhasilan Afdeling Malang menjadi produksi jantung kopi tidak terlepas dari pengaruh iklim dan letak geografis yang mendukung dalam produktifitas. Serta adanya dukungan infrastruktur kolonial dan kebijakan tanam paksa pada awal abad 19. Selain itu adanya keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta Belanda dalam ekspansi lahan serta pengelolaan tenaga kerja lokal.

Afdeling Malang menjadikan peran vital dalam ekonomi kopi kolonial dan menjadikannya representasi tentang bagaimana kekuatan ekonomi kolonial yang membentuk lanskap lahan pertanian dan masyarakat lokal pribumi Jawa Timur.

Kata kunci: Ekonomi Kolonial, Afdeling Malang, Kopi

Pendahuluan

Kopi merupakan salah satu hasil perkebunan yang sangat familiar di Indonesia. Pada periode tahun 1830 hingga 1930 merupakan babak penting dalam sejarah ekonomi kolonial di Nusantara, terutama dalam konteks pengembangan sektor perkebunan salah satunya adalah perkebunan kopi di Malang. Perkebunan lahir dan berkembang di Indonesia pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Belanda mengenalkan perkebunan di Indonesia dengan menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830, dengan cara mewajibkan setiap desa menanam tanaman komoditi ekspor, seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanahnya (Sartono, 1994). Terlebih lagi pada sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi titik awal dari perubahan struktur ekonomi agraria di Hindia Belanda. Kopi yang berasal dari Indonesia kala itu sangat digemari oleh bangsa eropa. Salah satu komoditas utama yang menjadi andalan dalam sistem ini adalah kopi, yang kemudian berkembang menjadi salah satu ekspor unggulan yang mendatangkan keuntungan besar bagi pihak kolonial. Di lain sisi, seluruh hasil panen dari tanaman kopi tersebut pada akhirnya harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kolonial. Petani atau masyarakat lokal tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan harga jual yang diinginkan, karena harga sudah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah Kolonial Belanda. Secara tidak langsung hal ini berakibat adanya ketimpangan dalam relasi ekonomi antara rakyat dengan penguasa kolonial. Keuntungan lebih banyak berpihak pada kepentingan kolonial daripada kesejahteraan petani itu sendiri.

Menariknya lagi di era saat ini, kopi merupakan komoditas ekspor terbesar setelah kelapa sawit dan kelapa. Karenanya, pengembangan kopi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kopi secara nasional berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang melibatkan sekitar 1,96 juta rumah tangga (RT) petani (Syakir & Surmaini, 2017). Dari sekian banyak lokasi perkebunan di nusantara, Afdeling Malang nampaknya dijadikan prioritas utama khususnya di Jawa bagian timur. Wilayah Malang khususnya kawasan yang dikenal sebagai Afdeling Malang memegang peranan strategis dalam produksi kopi di nusantara. Letaknya yang berada di dataran tinggi dengan kondisi tanah dan iklim yang ideal menjadikan wilayah ini sebagai pusat produksi kopi berkualitas tinggi. Namun, peran vital Afdeling Malang dalam peta ekonomi perkebunan kopi Hindia Belanda masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur sejarah ekonomi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sekaligus memaparkan dinamika ekonomi perkebunan kopi di Nusantara pada kurun waktu 1830–1930 dengan fokus utama pada peran Afdeling Malang sebagai pusat produksi kopi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba merepresentasikan secara menyeluruh tentang bagaimana struktur ekonomi yang terbentuk di masa kolonial, termasuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, secara langsung memengaruhi praktik produksi hingga distribusi komoditas kopi di wilayah Afdeling Malang. Penelitian ini juga akan

memaparkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berintegrasi dalam membentuk dinamika ekonomi lokal pada masa itu. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri pengaruh aktivitas perkebunan terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan terkait dengan historiografi ekonomi kolonial Indonesia. Dengan fokus utama pada Afdeling Malang sebagai studi kasus, penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman tentang bagaimana ekonomi perkebunan tidak hanya menjadi alat eksploitasi kolonial, namun juga membentuk dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang menyeluruh. Disamping itu, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi kajian ekonomi historis serta wacana pembangunan berkelanjutan berbasis sejarah lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research sebagai pendekatan utama untuk menganalisis dinamika perkebunan kopi di Afdeling Malang kurun waktu 1830 hingga 1930. Metode ini digunakan karena fokus kajian terletak pada penelusuran dan analisis data historis yang terdokumentasi dalam berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis, yaitu menelusuri peristiwa masa lalu melalui sumber pustaka yang relevan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi kebijakan serta praktik kolonial di sektor perkebunan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dan jenis literatur yang relevan, seperti laporan tahunan perkebunan, arsip pemerintah Hindia Belanda, catatan administrasi Afdeling Malang, dan surat kabar zaman kolonial. Selain itu digunakan pula sumber sekunder seperti buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lain yang membahas ekonomi kolonial, sejarah perkebunan di Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

1. Awal Mula Perkebunan Kopi di Malang

Perkembangan perkebunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari dinamika kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Umumnya, di wilayah-wilayah ini, sistem perkebunan muncul sebagai kelanjutan dari ekspansi kapitalisme agraris Barat yang dibawa melalui ekonomi kolonial. Pada awal kemunculannya, sistem ini memperkenalkan model baru dalam kegiatan pertanian, yakni pertanian komersial bercirikan kolonial (Kartodirjo & Suryo, 1991).

Sebelum sistem perkebunan dari Barat diperkenalkan, masyarakat agraris di negara-negara berkembang sudah menjalankan sistem kebun sebagai bagian dari ekonomi pertanian tradisional. Dalam konteks ini, kebun biasanya menjadi kegiatan tambahan yang melengkapi usaha utama mereka, yaitu pertanian pangan. Sistem kebun ini umumnya berskala kecil, tidak memerlukan banyak modal, menggunakan lahan yang terbatas, dan mengandalkan tenaga kerja keluarga. Fokus utamanya bukan pada pasar, melainkan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari (subsisten). Karakteristik tersebut menggambarkan pola umum pertanian tradisional yang belum terintegrasi dengan sistem kapitalisme atau industrialisasi (Kartodirjo & Suryo, 1991).

Sebaliknya, sistem perkebunan merupakan bagian dari ekonomi pertanian yang berorientasi komersial dan kapitalistik. Perkebunan dijalankan dalam skala besar dan

kompleks, membutuhkan investasi modal yang tinggi, memanfaatkan lahan luas, serta mengorganisir tenaga kerja dalam jumlah besar dengan pembagian kerja yang sistematis. Ciri khas lainnya adalah penggunaan tenaga kerja upahan, penerapan teknologi modern, spesialisasi produksi, serta sistem administrasi dan birokrasi yang terstruktur. Tanaman yang dibudidayakan umumnya merupakan tanaman komersial yang ditujukan untuk ekspor ke pasar internasional. Oleh karena itu, sistem perkebunan menjadi bagian dari ekonomi modern yang berasal dari Barat, dan kehadirannya di negara-negara berkembang sangat terkait dengan proses kolonialisme dan modernisasi (Kartodirjo & Suryo, 1991).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870, banyak investor asing mulai mendirikan perkebunan dan ikut meramaikan sektor ekonomi perkebunan yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang ini juga mendorong perluasan area perkebunan, terutama di wilayah pedalaman hutan dan lereng pegunungan. Di wilayah Afdeling Malang, perkebunan kopi terus mengalami pertumbuhan hingga akhir abad ke-19, ditandai dengan munculnya sejumlah perkebunan kopi milik swasta yang berkontribusi pada meningkatnya produktivitas kopi serta menimbulkan berbagai perubahan dalam lingkungan perkebunan (Afgani & Husain, 2018).

Wilayah Regentschap Malang memiliki cakupan yang cukup luas. Secara administratif, daerah ini terdiri atas delapan distrik, yaitu Ngantang, Penanggungan, Pakis, Karanglo, Gondanglegi, Turen, Sengguruh (Kepanjen), dan Kota Malang. Kawasan ini juga dikenal sebagai pusat kegiatan para pengusaha perkebunan yang beroperasi di wilayah lereng gunung Semeru, Bromo, Arjuna, dan Kawi. Karena kesuburannya yang tinggi, daerah ini menjadi lokasi berdirinya banyak perusahaan perkebunan (*onderneming*) pada akhir abad ke-19. Tahun 1832 dipilih sebagai titik awal dalam pembahasan ini, karena pada tahun tersebut pemerintah kolonial mulai membuka lahan di wilayah Kabupaten Malang untuk keperluan penanaman kopi (Hudiyanto, 2015a).

Perkembangan perkebunan kopi di Malang pada periode 1830 hingga 1930 berakar dari masa penjajahan Belanda dan merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem pertanian di Nusantara, yang diarahkan pada peningkatan produksi komoditas ekspor khususnya kopi Arabika melalui penerapan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) oleh pemerintah kolonial. Pada awal abad ke-19, kebijakan kolonial tidak hanya menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah utama pertanian komersial, tetapi juga memaksimalkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan tenaga kerja lokal secara paksa. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, diwarnai oleh praktik eksploitasi dan perlawanan, yang turut memengaruhi tata kelola lahan di Malang. Fokus kolonial pada ekspor komoditas bernilai tinggi turut membentuk tatanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, di mana tanah dan tenaga kerja secara penuh diarahkan untuk melayani kebutuhan pasar internasional yang terus berkembang (Lathifah, 2018).

Pada tahun 1832, pemerintah Kolonial Belanda mulai membuka lahan di wilayah Afdeling Malang untuk keperluan penanaman kopi yang pertama kali. Lokasi Afdeling Malang terletak di antara dua jajaran pegunungan, yakni Pegunungan Arjuna-Kawi di sisi barat dan Bromo-Semeru di sisi timur. Letak geografis ini memberikan keuntungan besar karena adanya gunung berapi aktif di sekitarnya. Keberadaan gunung-gunung tersebut membuat tanah di kawasan ini subur berkat kandungan abu vulkanik dan ketersediaan sumber air yang melimpah dua faktor penting yang sangat mendukung pengembangan perkebunan (Afgani & Husain, 2018).

Tahun 1837 di Malang, telah mampu memproduksi sekitar 57.000 pikul kopi. Pada masa tersebut, jumlah penduduk Malang mencapai sekitar 40.000 jiwa. Potensi besar dalam produksi kopi ini menarik perhatian banyak orang Eropa yang kemudian mulai menetap di Malang pada dekade 1830-an (Hudiyanto, 2015a). Pemerintah Hindia Belanda

pun tertarik dengan hasil kopi yang melimpah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1846, produksi kopi di Malang mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 80.000 jiwa (Syarifudin et al., 2023).

Penanaman kopi dalam skala industri di Malang dimulai pada tahun 1874. Perkebunan milik van der Elst di Desa Soembool, Distrik Karanglo, tercatat sebagai yang pertama menyewa lahan secara resmi untuk tujuan eksploitasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Berdasarkan *Overschrijving Ordonantie* No. 27, proses pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Tanah terhadap lahan-lahan yang berada di bawah yurisdiksi Hukum Barat, dan dari proses ini dikeluarkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah bagi pemegangnya. Perkebunan Soembool menyewa lahan dari pemerintah Hindia Belanda berupa tanah yang masih mentah atau belum diolah sebagai perkebunan, seluas kurang lebih 500 bahu. Lahan tersebut terletak di lereng selatan Gunung Arjuno, dengan ketinggian antara 800 hingga 1500 meter di atas permukaan laut, yang terdiri atas medan glega tanah longgar, berpasir, dan memiliki lapisan humus dengan ketebalan tertentu (Afgani & Husain, 2018).

2. Pasca UU Agraria 1870-1930

Catatan penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria atau yang dikenal dengan *Agrarische Wet* pada tahun 1870, wilayah nusantara memasuki era baru dalam perjalanan sejarahnya. Era tersebut ditandai dengan berkembangnya sektor perkebunan di berbagai wilayah nusantara khususnya hasil perkebunan yang sangat laku keras di pasar eropa. Kebijakan ini menjadi titik awal dari perubahan besar dalam pengelolaan lahan, yang kemudian membuka peluang bagi masuknya investasi asing dan perluasan lahan-lahan pertanian skala besar. Hasil perkebunan tersebut khususnya untuk komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan tembakau. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek ekonomi, namun juga pada struktur sosial masyarakat setempat yang mulai terlibat dalam sistem perkebunan kolonial tersebut. Pada tahun 1874, terjadi sebuah perubahan yang menonjol dalam sejarah perkebunan kopi di wilayah Afdeling Malang. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya volume produksi, tetapi juga terlihat jelas dari cara pengelolaan lahannya. Salah satu langkah besar yang diambil pada masa itu adalah pembukaan lahan secara masif, yang dilakukan dengan mengubah kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kopi. Proses tersebut dilakukan secara sistematis yang mencerminkan dorongan kuat dari pihak kolonial untuk meningkatkan hasil produksi demi memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terasa pada perubahan lingkungan, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pada periode Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*), komoditas kopi merupakan salah satu komoditas primadona dalam perdagangan internasional. Seluruh wilayah Hindia Belanda yang memiliki geografi pegunungan aktif menjadi wilayah perkebunan kopi, termasuk juga Afdeling Malang (Goor, 1986).

Di sisi lain, diberlakukannya Undang-Undang Agraria telah membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan tanah di wilayah Hindia Belanda. Salah satu dampak yang paling mencolok dari sistem tersebut adalah meningkatnya minat para pengusaha asing, yang dikenal dengan sebutan *ondernemers*. Para pengusaha swasta tersebut berinvestasi dan mendirikan usaha perkebunan serta bekerjasama dengan penduduk sekitar untuk selanjutnya dijadikan sebagai tenaga kerja perkebunan. Melalui mekanisme sewa tanah yang diatur dalam undang-undang tersebut, para pengusaha ini memperoleh akses legal untuk mengelola lahan dalam skala besar. Kemudian dalam perjalanannya menjadi awal

dari ekspansi perkebunan swasta di Indonesia kala itu. Terlebih berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam perkembangannya, jika dilihat dari jenis kopi yang dibudidayakan di kawasan perkebunan Afdeling Malang adalah kopi Robusta. Hal ini bukan tanpa alasan, bahwa kopi robusta dikenal memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan penyakit. Selain itu, mampu tumbuh optimal di ketinggian dan kondisi tanah yang sesuai dengan karakteristik wilayah Afdeling Malang. Para pengelola perkebunan pada masa itu dalam hal ini pengusaha swasta asing cenderung memilih kopi robusta sebagai komoditas utama yang ditanam untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang cukup tinggi. Perkebunan kopi yang tertanam di kawasan Malang didominasi oleh jenis kopi Robusta dan juga ada beberapa yang lainnya seperti Arabika/Jawa dan Liberia (Afgani et al., 2018).

Tahun 1884 hingga 1894 masa pemerintahan Raden Aria Noto Diningrat III, terjadi perubahan besar dan signifikan. Meskipun mulai memimpin pada tahun 1884, namun perubahan besar dimulai lebih awal yaitu sekitar tahun 1870. Pada masa inilah terjadi pergeseran cukup besar dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan tanah yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Lahan tersebut disewa untuk dijadikan sebagai wilayah perkebunan oleh para pengusaha asing dalam istilah Belanda disebut *onderneming*. Sehingga perluasan lahan perkebunan swasta tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan, namun juga berdampak secara nyata terhadap wilayah perkotaan, khususnya Kota Malang. Pada masa ini pula muncul keharusan dan kebutuhan untuk menata kota secara lebih sistematis dan terstruktur. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1873 telah keluar keputusan resmi dari pemerintahan kolonial berupa penetapan batas administratif untuk wilayah *wijk-wijk* atau unit unit wilayah yang lebih kecil. Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam proses transformasi Kota Malang dari wilayah yang semula dikelola tradisional menjadi sebuah kota yang dikelola secara administratif (Bahtiar et al., 2023a).

Di balik berkembangnya industri perkebunan Kopi di Malang, terdapat sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu munculnya pembentukan lembaga baru berkaitan dengan sistem produksi tersebut. Dalam industri perkebunan kopi terdapat aktivitas yang kompleks yang dimulai dari proses penanaman, pemetikan, pengumpulan hasil panen, distribusi sampai pengepakan untuk pengiriman. Dari rangkaian aktivitas tersebut menuntut adanya pengawasan secara sistematis dan terorganisir, khususnya berkaitan dengan monopoli penjualan kopi yang dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Menariknya, pada pertengahan abad ke XIX masyarakat pribumi telah menunjukkan kemandirian dalam mengelola perkebunan kopi mereka sendiri. Para petani pribumi, khususnya dari distrik Pakis dan Penanggungan mampu memanfaatkan lahan mereka untuk menanam kopi dengan hasil yang cukup melimpah. Dalam laporan catatan resmi *Algemeen Verslag Residentie Pasoeroean* tahun 1847, para penduduk pribumi mampu memanen hingga 100 sampai 200 pikul kopi dari kebun mereka. Memasuki dekade 1910-an, terdapat pusat penyimpanan dengan sejumlah besar gudang kopi di sekitar alun-alun Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa peran kopi begitu besar dalam struktur ekonomi lokal pada masa itu. Disamping itu, aktivitas penanaman kopi tidak hanya terjadi dalam skala industri besar milik swasta atau kolonial, namun juga dilakukan oleh penduduk sekitar terutama yang tinggal di kawasan pinggiran hutan (Hudiyanto, 2015b).

Undang-undang agraria pasca 1870, telah membawa dampak yang cukup signifikan di wilayah Malang. Dari segi sosial dan kependudukan, telah menarik perhatian banyak orang dari luar daerah untuk bermigrasi. Banyak diantara pendatang berasal dari wilayah Kediri, Surabaya, dan Pasuruan berbondong-bondong datang ke wilayah seperti Kota Malang, Sengguruh, dan Gondanglegi untuk mengadu nasib dalam menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja yang mendorong mobilitas penduduk di wilayah tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perluasan perkebunan mampu menggerakkan perubahan sosial secara lebih luas, dan menjadikan area di sekitar Afdeling Malang semakin strategis dan berkembang dalam jaringan kolonial Belanda (Bahtiar et al., 2023a).

3. Kondisi Sosial

a. Tenaga Kerja Perkebunan

Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa berlakunya Undang-Undang Agraria di wilayah Afdeling membuat politik monopoli yang sebelumnya mendominasi menjadi tidak berlaku, sehingga pada sektor perkebunan dibutuhkan adanya penambahan tenaga kerja oleh rakyat secara besar-besaran yang nantinya digunakan untuk menggarap lahan, menanam, merawat, memanen, mengangkut, dan mengolah di pusat-pusat pengelolaan dan gudang pada masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Pada tahap kegiatan ini proses pengerahan dan perekrutan tenaga kerja dilakukan oleh Ikatan Organisasi Desa setempat dalam peraturan *De Koelie-Wetgeving Voor De Buitengewesten*, sehingga konsep sistem tanam paksa menyentuh hingga masyarakat agraris desa (Bahtiar et al., 2023). Proses perjanjian tersebut berkisar antara tahun 1860 hingga 1870 yang melibatkan pengusaha dengan para buruh yang telah mereka rekrut, namun para pengusaha juga melakukan perjanjian hak tanah, sehingga dari kedua belah pihak mendapati keuntungan dan kerugian yang sama (Bahtiar et al., 2023).

Perkebunan kopi Limburg merupakan salah satu perkebunan kopi terbesar yang berada di wilayah *Afdeling* Malang. Berkisar antara 120 hingga 1300 orang yang termasuk dalam buruh perkebunan. Beberapa perkebunan lain seperti di Distrik Sengguruh, Penanggungan, dan Karanglo masih dalam tahap pengembangan, sehingga pengusaha masih lebih fokus dalam pengelolaan lahan. Adapun perkebunan-perkebunan kecil yang masih belum memiliki tenaga kerja dalam pengiriman dan pengeringan biasanya pengusaha menjual kopi secara langsung dalam bentuk biji yang masing segar. *N.V. Koffiepellerij* merupakan salah satu dari pengepul yang membeli kopi mentah untuk yang nantinya diolah menjadi kopi bubuk siap minum (Afgani et al., 2018). Selain buruh harian, perkebunan juga mempekerjakan tenaga kerja inti seperti mandor, kontrolir, dan administrator. Mandor bertugas untuk mengatur pekerjaan buruh kopi, sementara kontrolir yang posisinya lebih tinggi bertugas untuk mengawasi kelancaran regulasi kopi. Di sisi lain, administrator bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai layanan terkait pembangunan di area perkebunan. Selain itu penerapan sistem gaji atau pendapatan para buruh juga sudah diatur dalam kesepakatan di awal, seperti yang telah dijelaskan. Karena gaji buruh sudah ditentukan, maka pendapatan para pekerja di perkebunan pun menjadi lebih jelas. Kondisi ini membawa dampak pada perekonomian masyarakat. Jika sebelumnya transaksi masih banyak dilakukan dengan sistem barter, sejak diperkenalkannya mata uang yang bersifat lokal, pola transaksi mulai bergeser menjadi berbasis uang lokal (Afgani et al., 2018).

b. Peningkatan Produksi

Dengan adanya penerapan kebijakan yang struktural maka juga berakibat pada hasil yang maksimal. Hal tersebut terlihat dari nilai ekspor yang mencapai 47 gulden di masa-masa awal penerapan kebijakan. Di *Afdeling* sendiri, pertumbuhan sektor perkebunan pada periode 1875-1880an juga berlangsung pesat ditandai dengan jumlah pengusaha dan perusahaan perkebunan yang meningkat tajam, dengan total penghasilan mencapai 169 juta gulden. Dengan situasi tersebut menandakan bahwa lahan di *Afdeling* memang subur dan sangat potensial sebagai lokasi investasi yang menguntungkan (Afgani et al., 2018). Perubahan pesat lainnya dimulai pada masa R.A.A. Noto Adiningrat II, dan semakin dipercepat ketika pemerintahan beralih ke Raden Adipati Notodiningrat III pada tahun

1884-1894. Namun pada periode tersebut terdapat pula penurunan harga kopi di pasar dunia, tetapi kegiatan penanaman kopi masih tetap berlangsung. Sentra perkebunan kopi saat itu berpusat di Kota Malang, Penanggungan, dan Ngantang. Dalam kurun waktu satu tahun dari ketiga distrik tersebut berhasil menyetorkan sebanyak 3831 pikul kopi (Afgani et al., 2018).

c. Distribusi Kopi

Hasil produksi kopi dari perkebunan-perkebunan tersebut kemudian didistribusikan ke Kota Surabaya. Kota ini menjadi pilihan karena merupakan pelabuhan bertaraf internasional di Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor-impor oleh pemerintah kolonial. Kopi-kopi tersebut diangkut menggunakan lori, lalu menjalani proses pengeringan dan setelah kering, kopi dibawa ke dataran rendah untuk kemudian diangkut menggunakan kereta api atau trem menuju Pelabuhan Surabaya (Anggraeni & Aisyah, 2021).

Selain trem dan kereta api jarak jauh, transportasi lokal yang berkembang saat itu meliputi dokar, gerobak, dan lori. Semua moda transportasi ini berperan penting dalam mengangkut hasil bumi, termasuk kopi. Bahkan surat kabar kolonial sempat memberitakan penggunaan gerobak untuk mengangkut tanaman kopi menuju jalur kereta api melalui lori. Lori sendiri merupakan alat transportasi modern pada masanya, berbentuk ramping dan berjalan di atas rel satu arah. Seorang pengemudi lori bertugas melintas diantara perkebunan kopi, mengangkut hasil panen, lalu membawanya turun ke dataran yang lebih rendah. Dari sana, kopi-kopi tersebut kemudian dipindahkan ke kereta api atau trem untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Surabaya (Afgani et al., 2018). Adanya perkembangan transportasi ini mempercepat proses distribusi hasil bumi, sekaligus mempererat hubungan antara kawasan pedalaman dan pelabuhan ekspor. Mobilitas yang semakin tinggi membuat volume perdagangan meningkat, dan pada akhirnya memperkuat peran *Afdeling* Malang sebagai salah satu sentra perkebunan penting di Hindia Belanda (Afgani et al., 2018).

Sistem operasional trem yang ditarik oleh lokomotif uap mulai berjalan pada tahun 1879, yang melayani rute antara Stasiun Trem Jagalan dan Stasiun Trem Bululawang di kawasan Kota Malang dan sekitarnya. Jalur sepanjang 11 kilometer ini menjadi rute trem pertama yang dibuka untuk umum oleh perusahaan trem tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1908, jaringan trem uap Malang berhasil memperluas jalurnya hingga menjangkau wilayah-wilayah penyangga, mempermudah distribusi hasil perkebunan, terutama kopi (Anggraeni & Aisyah, 2021). Setelah dikumpulkan dari berbagai distrik di Kota Malang, hasil kopi kemudian disimpan di gudang milik residen. Dari gudang ini, kopi-kopi tersebut dikirim ke Surabaya, sebelum akhirnya diteruskan ke Amsterdam dibawah naungan Amsterdam NHM (*Nederlandsch Handel Maatschappij*). Dengan adanya jalur distribusi ini telah memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur transportasi dalam mendukung keberhasilan perdagangan komoditas kolonial (Anggraeni & Aisyah, 2021).

d. Akhir Kejayaan Kopi *Afdeling* Malang

Selama fase kejayaan perkebunan kopi di Malang, setidaknya ada tiga jenis kopi yang ditanam di wilayah *Afdeling*, pada umumnya yaitu arabika, liberika, dan robusta. Namun hanya ada dua primadona tetap yang mejadi komoditas utama lokal di Malang yaitu arabika dan robusta. sedangkan kopi liberika merupakan kopi yang didatangkan oleh pemerintah kolonial pada abad ke-19 sebagai upaya mengganti kopi arabika yang pada saat itu mengalami penurunan kualitas panen akibat penyakit karat daun, namun upaya tersebut nampaknya tidak membuahkan hasil yang maksimal dikarenakan bibit liberika juga mengalami masalah yang sama, sedangkan kopi jenis robusta justru masih bertahan sehingga dampak kerugian yang dialami oleh pengusaha dan pemerintah tidak begitu besar (Anggraeni & Aisyah, 2021)

Java Coffee merupakan sebutan untuk kopi yang dihasilkan di tanah Jawa dan merupakan kopi yang paling banyak diminati oleh pasar Eropa dalam *event* besar. Tidak hanya dalam pengaruh internasional, keberadaan kopi di Jawa khususnya memiliki peran tersendiri bagi masyarakat lokal, terutama dalam proses ritual yang kental. Sehingga hal tersebut terkadang menunjukkan adanya sedikit penyimpangan dari segi fungsi dan rasional dalam penerapan ritual (Anggraeni & Aisyah, 2021).

Selama bertahun-tahun penuh Jawa khususnya wilayah *Afdeling* Malang mengalami kemajuan yang pesat akibat dari keberadaan perkebunan kopi, pada akhirnya industri kopi juga mengalami masa surut. Hal tersebut merupakan salah satu dari dampak besar kompetitor yang mulai mengalihkan fungsi lahannya dari perkebunan kopi menjadi tebu, sehingga tebu menjadi salah satu kompetitor terbesar produksi kopi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya beberapa pabrik-pabrik besar yang memproduksi gula seperti Kebon Agung, Kreet, dan Panggungrejo di Malang. Penurunan produksi secara pesat terus terjadi hingga kedatangan kolonial Jepang yang secara masif mengubah tanaman ekspor menjadi tanaman pangan, hal tersebut dikarenakan orientasi kebutuhan pasar Jepang bukan lagi mengenai ekonomi perdagangan tetapi kebutuhan logistik perang (Anggraeni & Aisyah, 2021).

Kesimpulan

Afdeling Malang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memainkan peran sentral dalam struktur ekonomi kolonial Hindia Belanda, khususnya dalam sektor perkebunan kopi antara tahun 1830 hingga 1930. Keberhasilan kawasan *Afdeling* tidak hanya semata-mata disebabkan oleh kebijakan tanam paksa atau Undang-Undang Agraria, tetapi juga kehadiran faktor lain seperti kesuburan tanah vulkanik dan ketersediaan air yang menjadikan wilayah tersebut sangat ideal untuk dijadikan kawasan perkebunan, tidak hanya komoditas kopi tetapi juga terdapat tebu, teh, dan rempah-rempah. Dibawah kendali kolonial, transformasi lahan dan tenaga kerja lokal diarahkan sepenuhnya dan menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor, yang pada akhirnya secara tidak langsung membentuk dinamika sosial baru berupa migrasi penduduk, perubahan pola konsumsi, serta pergeseran struktur ekonomi tradisional menuju kapitalistik yang sederhana.

Namun demikian, kisah kejayaan *Afdeling* Malang juga memperlihatkan aspek kerentanan sistem ekonomi kolonial. Adanya ketergantungan pada satu komoditas pada saat itu membuat wilayah ini rentan terhadap fluktuasi pasar dunia dan perubahan kebijakan kolonial, sebagaimana terlihat pada saat komoditas gula secara perlahan mulai menggantikan dominasi kopi, serta saat kedatangan kolonial Jepang mengalihkan prioritas produksi dalam negeri demi kebutuhan logistik perang. Dengan demikian, sejarah kopi di *Afdeling* Malang bukan hanya narasi tentang ekspansi ekonomi kolonial, tetapi juga cermin dari bagaimana kolonialisme membentuk, mengendalikan, sekaligus meninggalkan warisan yang kompleks bagi lanskap sosial dan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

- Afgani, R., & Husain, S. B. (2018). Manisnya Kopi di Era Liberal: Perkebunan Kopi *Afdeling* Malang, 1870-1930. *Indonesian Historical Studies*, 2(1), 24–35.
<https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.3199>
- Afgani, R., Husain, S. B., & Korespondensi, P. (2018). Manisnya Kopi di Era Liberal: Perkebunan Kopi *Afdeling* Malang, 1870-1930. In *Indonesian Historical Studies* (Vol. 2, Issue 1).
- Anggraeni, P., & Aisyah. (2021). *KOPI, PAGEBLUK, DAN KOTA: Menyulam Wajah Kota Malang di Era Kolonial* (Z. Arifin, Ed.). Terakota.

- Bahtiar, M., Buruh Perkebunan..., K., Syarifudin, M. B., Sapto, A., & Hudyanto, R. (2023a). *Kehidupan buruh perkebunan kopi di Dampit tahun 1870-1930*. 3(2), 174–185.
- Bahtiar, M., Buruh Perkebunan..., K., Syarifudin, M. B., Sapto, A., & Hudyanto, R. (2023b). *Kehidupan buruh perkebunan kopi di Dampit tahun 1870-1930*. 3(2), 174–185.
- Goor, J. van. (1986). *Trading companies in Asia: 1600-1830*. HES Uitgevers.
- Hudyanto, R. (2015a). *KOPI DAN GULA: PERKEBUNAN DI KAWASAN REGENTSCHAP MALANG, 1832-1942*. 1(2), 95.
- Hudyanto, R. (2015b). *KOPI DAN GULA: PERKEBUNAN DI KAWASAN REGENTSCHAP MALANG, 1832-1942*. *SEJARAH DAN BUDAYA*, 9, 96–115.
- Kartodirjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan Indonesia*. Aditya Media.
- Lathifah, A. (2018). Dinamika Petani Kopi Lahan Terbatas di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Anuva*, 2(4), 429.
<https://doi.org/10.14710/anuva.2.4.429-436>
- Syakir, M., & Surmaini, E. (2017). PERUBAHAN IKLIM DALAM KONTEKS SISTEM PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN KOPI DI INDONESIA / Climate Change in the Context of Production System and Coffee Development in Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 36(2), 77.
<https://doi.org/10.21082/jp3.v36n2.2017.p77-90>
- Syarifudin, M. B., Sapto, A., & Hudyanto, R. (2023). *Kehidupan buruh perkebunan kopi di Dampit tahun 1870-1930*. *Historiography*, 3(2), 174.
<https://doi.org/10.17977/um081v3i22023p174-185>